



**“PERANAN FSPMI DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DI
KABUPATEN BEKASI TAHUN 1999-2012”:
AKSI TUTUP JALAN TOL 27 JANUARI 2012**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

**Kresna Karlingga
NIM 13030112130022**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

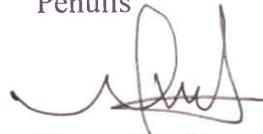
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Kresna Karlingga, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2), maupun Strata Tiga (S-3), pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 16 Maret 2018

Penulis



Kresna Karlingga

NIM 13030112130022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Kami berjuang bukan untuk diri kami, tapi untuk kesejahteraan keluarga kami”

(Endang Ganda Sumekar)

“Every day lived is a page of history”

(Faceless Void Hero Dota2)

“Seluruh sejarah adalah sejarah perjuangan kelas, perjuangan antara kelas dihisap dengan yang menghisap”

(Friedrich Engels)

“Kami adalah kediktatoran demokrasi rakyat, dipimpin oleh kelas pekerja dan berdasarkan persekutuan buruh dan tani”

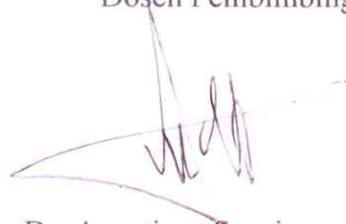
(Mao Tze Tung)

“Islam menyuruh untuk melawan kekufuran, salah satu bentuk kekufuran yang nyata adalah penindasan terhadap kaum pekerja”

(Munir)

Dipersembahkan untuk:
Buruh-buruh yang sedang berjuang.

Disetujui,
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in purple ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Dr. Agustinus Supriyono, M. A.
NIP 195503151987031001

Skripsi dengan Judul “Peranan FSPMI dalam Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi Tahun 1999-2012: Aksi Tutup Jalan Tol 27 Januari 2012” yang disusun oleh Kresna Karlingga (13030112130022) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Selasa, 8 Mei 2018.

Ketua,



Prof. Dr. Sutejo K. W., M. Si.
NIP 196005151985031004

Anggota I,



Dr. Agustinus Supriyono, M. A.
NIP 195503151987031001

Anggota II,



Dr. Endah Sri Hartatik, M. Hum.
NIP 196705281991032001

Anggota III,



Prof. Dr. Dewi Yuliati, M. A.
NIP 1983071920092004

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Redyanto Noor, M. Hum.
NIP 19590307 198603 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Tuhan seluruh semesta alam atas segala berkah dan karunia-Nya kepada semua makhluk yang ingkar dan mengimaninya, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul, “Peranan FSPMI dalam Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi Tahun 1999-2012: Aksi Tutup Jalan Tol 27 Januari 2012”. Skripsi ini disusun sebagai syarat menempuh ujian akhir Program Strata 1 di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan sanggup terselesaikan tepat waktu, jika tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih pertama kepada Dr. Redyanto Noor, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum. selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan izin, arahan, serta kemudahan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si. selaku dosen wali yang selalu membantu berbagai permasalahan akademik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro.

Kedua, penulis sampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing Dr. Agustinus Supriyono, M. A. yang telah menjadi teman dalam berdiskusi. Gagasan-gagasan dan pemikiran yang beliau kemukakan sangat membantu penulis dalam mengarahkan penulisan skripsi ini. Sosoknya yang tegas membuat penulis merasa nyaman dan mudah memahami nasihat-nasihat agar penulisan skripsi ini lebih komprehensif. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap dosen penguji Prof. Dr. Sutejo Kuwat Widodo, M. Si, Prof. Dr. Dewi Yuliati, M. A, Dr. Endah Sri Hartatik, M. Hum., yang telah memberikan kontribusi pemikiran guna penyempurnaan penyusunan skripsi ini.

Ketiga, penulis sampaikan terima kasih kepada segenap dewan pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Bekal ilmu dan nasehat kehidupan yang beliau berikan sangat berguna bagi penulis untuk meraih cita-cita dan masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada segenap staf tata usaha serta pengurus perpustakaan Departemen Sejarah, Mbak Fatma dan Pakde Romli yang telah membantu dalam pelayanan administrasi yang maksimal selama penulis menempuh masa pendidikan di Universitas Diponegoro Semarang.

Keempat, terima kasih kepada Syawal Harahap, Obon Tabroni, Sukamto, M. Nur Fahrozi dan segenap pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia baik tingkat pusat maupun tingkat cabang Kabupaten Bekasi yang telah memberikan izin dan mendukung penuh dalam penelitian ini. Keramahan, keterbukaan dari keluarga besar FSPMI sangat membekas di hati penulis. Penulis belajar banyak tentang arti perjuangan buruh yang selama ini banyak dipandang orang sebelah mata, tidak sedikit juga yang bilang bahwa “Upah buruhkan udah tinggi, tapi masih saja demo. Dasar tidak bersyukur”.

Selanjutnya kelima, penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayah Endang Ganda Sumekar dan Ibu Masy’amah. Terima kasih untuk doa, nasihat dan uang bulannya yang tidak kunjung berhenti kepada penulis. Terima kasih juga untuk kedua saudara kandung penulis, Wanda Ayuda Sekarini dan Muhammad Ariq Musyaffa yang telah memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih telah menyadarkan penulis tentang arti pentingnya kesabaran dan penyerahan diri terhadap takdir Tuhan.

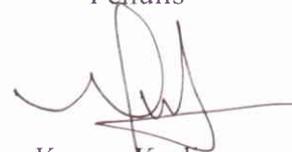
Keenam, terima kasih pula penulis sampaikan kepada Rakhmat, Julius, Kudus, Rufal, Ferhat, Duta, Irvan, Arif Bapak, Arif Bos, Firman, Umar, Depe, Okik, Ichsan, April, Atika, Deby, Gifar dan teman-teman seperjuangan Sejarah angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini, tingkah laku dan gelak tawa kalian tidak akan penulis lupakan. Sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari kekhilafan, penulis meminta maaf kepada teman-teman atas perilaku penulis.

Ketujuh, ucapan terima kasih kepada senior-senior Sejarah, Pak Annas, Mas Eka Setiawan, Mas Uli, Mas Piti, Mas Very, Mas Ade, Bang Akhwal, Bang Akmal, Mas Dinar, Mas Kipli, Mas Arif, Mas Weling dan senior-senior lainnya. Terima kasih telah mau berbagi pengalaman hidup kalian, terima kasih telah menjadi senior yang mengayomi.

Kedelapan, terima kasih kembali penulis ucapkan untuk junior-junior Sejarah angkatan 2013 dan 2014. Terima kasih telah menyadarkan penulis bahwasanya penulis telah mempunyai banyak junior dan harus secepatnya lulus dari Universitas Diponegoro.

Semarang, 16 Maret 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Kresna Karlingga

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR DIAGRAM	xviii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xx
RINGKASAN	xxi
SUMMARY	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Pemikiran	18
F. Metode Penelitian	20
G. Sitematika Penulisan	22
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BEKASI MASA ORDE BARU HINGGA REFORMASI	24
A. Tinjauan Singkat Sejarah Kabupaten Bekasi	25
1. Wilayah Pembangunan I	28
2. Wilayah Pembangunan II	28
3. Wilayah Pembangunan III	29
B. Kondisi Wilayah dan Kondisi Penduduk Kabupaten Bekasi	31
1. Kondisi Geografis	31
2. Kondisi Penduduk dan Perkembangan Tata Kota	33
a. Kondisi Penduduk Berdasarkan Ekonomi	35
b. Kondisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan	38
c. Kondisi Penduduk Berdasarkan Agama	39
d. Tata Ruang Kabupaten Bekasi	40
C. Hubungan Industrial	41
1. Perjanjian Kerja	42
2. Kebijakan Pengupahan Buruh	44

BAB III	FSPMI SEBAGAI ORGANISASI BURUH MANDIRI	47
	A. Terbentuknya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)	47
	B. Struktur Organisasi FSPMI	52
	1. Visi	54
	2. Misi	54
	C. Konsolidasi dan Pembinaan Kader	61
	1. Pendidikan dan Publikasi	62
	2. Pendekatan Kasus	63
	3. Grebek Pabrik	64
BAB IV	AKSI BURUH TUTUP JALAN TOL JUM'AT 27 JANUARI 2012	72
	A. Faktor Penyebab	72
	B. Jalannya Aksi	83
	C. Hasil dan Peran Pemerintah	97
BAB V	SIMPULAN	102
	DAFTAR PUSTAKA	106
	DAFTAR INFORMAN	109
	LAMPIRAN	111

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
APD	: Akademi Pembangunan Desa
APINDO	: Asosiasi Pengusaha Indonesia
BBB	: Buruh Bekasi Bergerak
Botabek	: Bogor, Tangerang, dan Bekasi
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPK	: Dewan Pimpinan Kabupaten
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD GT TK	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat
FBSI	: Federasi Buruh Seluruh Indonesia
FOKUBA	: Federasi Organisasi Pekerja Keuangan dan Perbankan Indonesia
FNPBI	: Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia
FSBDS	: Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia I
FSPMI	: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
FSPSI	: Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
GASPERMINDO	: Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia
GARMET	: Garda Metal
Golkar	: Golongan Karya
ICTFU	: <i>International Confederation of Free Trade Union</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
Inkopbumi	: Induk Koperasi Buruh Metal Indonesia
IMF	: <i>International Metal Workers Federation</i>
Jabotabek	: Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KHL	: Kebutuhan Hidup Layak
KNI	: Komite Nasional Indonesia
Kodim	: Komando Distrik Militer
Kotif	: Kota Administratif
KPNI	: Kesatuan Pekerja Nasional Indonesia
KSBDSI	: Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia
KSPSI	: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LPE	: Laju Pertumbuhan Ekonomi

MPBI	: Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia
Munas	: Musyawarah Nasional
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
P4-D	: Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
P4-P	: Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Provinsi
PC	: Pimpinan Cabang
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PKB	: Perjanjian Kerja Bersama
PP	: Pimpinan Pusat
PPMI	: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PUK	: Pengurus Unit Kerja
PUSPI	: Permusyawaratan Urusan Sosial Pengusaha Indonesia
PWKT	: Perjanjian Waktu Kerja Tertentu
RIS	: Republik Indonesia Serikat
SB	: Serikat Buruh
SB AMP	: Serikat Buruh Automotif Mesin dan Perbengkelan
SB E	: Serikat Buruh Elektronik
SB PERPEN	: Serikat Buruh Percetakan dan Penerbitan
SB TSK	: Serikat Buruh Tekstil Sandang dan Kulit
SBH	: Survey Biaya Hidup
SK	: Surat Keputusan
SMS	: <i>Short Message Service</i>
SP	: Serikat Pekerja
SPA	: Serikat Pekerja Anggota
SPAMK	: Serikat Pekerja Automotif, Mesin, dan Komponen
SPD	: Serikat Pekerja Dirgantara
SPDG	: Serikat Pekerja Dok dan Galangan Kapal
SPEE	: Serikat Pekerja Elektronik Elektrik
SPL	: Serikat Pekerja Logam
SP LEM	: Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin
SPMI	: Serikat Pekerja Metal Indonesia
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
TKA	: Tenaga Kerja Asing
UMK	: Upah Minimum Kabupaten
UMP	: Upah Minimum Provinsi
UMSK	: Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
UMSP	: Upah Minimum Sektoral Provinsi

UNISMA : Universitas Islam “45”
UUD : Undang-Undang Dasar
WCL : *World Confederation of Labour*

DAFTAR ISTILAH

- Asosiasi* : merupakan proses interaksi yang mendasari terbentuknya lembaga-lembaga sosial.
- Buruh* : orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.
- Cleaning Service* : pelayanan yang diberikan terhadap kebersihan suatu gedung atau bangunan lainnya, yang dilakukan oleh petugas kebersihan secara seksama dan menyeluruh dengan bantuan alat-alat kebersihan mesin ataupun non mesin.
- Departemen* : suatu bagian yang memiliki tugas spesifik dari suatu organisasi yang lebih besar.
- Federasi* : gabungan beberapa perhimpunan yang bekerja sama dan seakan-akan merupakan satu badan, tetapi tetap berdiri sendiri.
- Go Politic* : adalah strategi perjuangan buruh dalam memperjuangkan hak-hak dasar buruh dengan menempatkan beberapa kader terbaiknya di lembaga legislatif.
- Hubungan Industrial* : adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan.
- Karyawan Kontrak* : adalah buruh yang bekerja pada perusahaan dengan batas waktu tertentu.
- Konfederasi* : gabungan dari beberapa organisasi dengan tujuan yang sama. Konfederasi buruh dibentuk seminimal minalnya oleh tiga federasi.
- Kongres* : pertemuan besar para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah.
- Konsolidasi* : perbuatan dan sebagainya untuk memperteguh atau memperkuat hubungan, persatuan, dan sebagainya.
- Konvensi* : permufakatan atau kesepakatan antarnegara, para penguasa pemerintahan, dan sebagainya.

<i>Mogok Kerja</i>	: penghentian kerja secara kolektif (bersama-sama) dengan tujuan menekan pengusaha/pemerintah untuk memajukan kepentingan pekerja/buruh.
<i>Omah Buruh</i>	: tempat berkumpulnya buruh di Kabupaten Bekasi, selain di kantor cabang FSPMI.
<i>Outsourcing</i>	: adalah buruh yang bekerja pada sebuah perusahaan melalui perusahaan penyalur/yayasan.
<i>Perusahaan Penyalur</i>	: perusahaan penyalur/yayasan adalah perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan lain dalam rangka menyalurkan tenaga ahli pada bidang-bidang tertentu.
<i>Propaganda</i>	: rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pihak yang mendengar atau melihat.
<i>Pungutan Liar</i>	: pengenaan biaya yang dikenakan pada tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya.
<i>Ratifikasi</i>	: pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.
<i>Serikat Pekerja</i>	: sebuah organisasi sebagai tempat berunding bagi pekerja atau buruh mengenai hak-hak dasar mereka, seperti upah, jam kerja, kondisi pekerjaan dan lain sebagainya.
<i>Solidaritas</i>	: sifat satu rasa senasib, sepenanggungan dan sebagainya atau perasaan setia terhadap kawan.
<i>Training Center</i>	: Pusat Pendidikan atau <i>Training Center</i> berfungsi sebagai tempat penggemblengan dengan tujuan untuk menciptakan kader-kader yang berkesinambungan, berilmu, loyal dan militan dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan Bangsa Indonesia.
<i>Unitaris</i>	: artinya bahwa setiap kegiatan atau pergerakan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut berasal dari komando pimpinan tingkat pusat.
<i>Upah</i>	: uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Yuridis

: adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Yuridis bersifat memaksa, artinya siapapun harus mematuhi aturan tersebut.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar:	
2.1 Logo Kabupaten Bekasi.	27
2.2 Konsep <i>daily urban system</i> .	31
2.3 Peta Wilayah Kabupaten Bekasi.	33
3.1 Perubahan Logo FSPMI.	51
3.2 Bagan Struktur Organisasi FSPMI.	53
4.1 Buruh menduduki jalan tol Jakarta-Cikampek.	95

DAFTAR DIAGRAM

No.	Diagram	Halaman
2.1.	Jumlah Pekerja di Kabupaten Bekasi.	36
2.2	Jumlah Pengangguran di Kabupaten Bekasi.	37
2.3	Jumlah Pekerja Sektor Industri di Kabupaten Bekasi.	37
2.4	Jumlah Pekerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Bekasi.	38

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman
2.1.	Luas dan Desa setiap Kecamatan di Kabupaten Bekasi.	32
2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2003-2011	34
2.4	Daftar Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Bekasi.	39
2.5	Jumlah Tempat Peribadatan dari Tahun 2003-2011.	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :		Halaman
A.	Peta penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi tahun 1990	111
B.	Peta penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi tahun 1999	112
C.	Materi pendidikan dasar FSPMI	113
D.	Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.211-Bangsos/2012	115

RINGKASAN

Skripsi yang berjudul “Peranan FSPMI dalam Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi Tahun 1999-2012: Aksi Tutup Jalan Tol 27 Januari 2012” ini mengkaji mengenai pergerakan buruh di Kabupaten Bekasi. Mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya aksi tutup tol pada tanggal 27 Januari 2012; Bagaimana reaksi APINDO dan Pemerintah terhadap aksi tutup, dan Bagaimana hasil dari aksi tutup tol, khususnya bagi para buruh di Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Buruh Bekasi Bergerak. Oleh karena merupakan penelitian sejarah maka metode yang digunakan adalah metode sejarah yang pada azasnya terdiri dari empat langkah secara beruntun yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Sementara pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sejarah pergerakan buruh, yang meliputi berbagai macam aspek, seperti sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya aksi tutup tol pada tanggal 27 Januari 2012 yang merupakan aksi buruh terbesar sejak masa Reformasi dimulai, serta upaya perlawanan apa yang dilakukan oleh buruh-buruh di Kabupaten Bekasi terhadap sikap Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Kedua adalah reaksi DPK APINDO dan pemerintah baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun pusat terhadap perselisihan antara buruh di Kabupaten Bekasi dengan DPK APINDO Kabupaten Bekasi. Untuk meredakan perselisihan industrial yang semakin memanas, Perselisihan antara buruh dengan majikan semakin memanas, Menteri Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku perwakilan pemerintah pusat mengadakan pertemuan guna mencari jalan keluar atas perselisihan tersebut. Pemerintah menilai bahwa aksi tersebut telah mengganggu kestabilan ekonomi dan politik, oleh karena itu perselisihan buruh yang terjadi di Kabupaten Bekasi harus secepatnya diselesaikan.

Ketiga, hasil dari aksi tersebut adalah kemenangan bagi buruh. Perjuangan menuntut hak dasar yang dilakukan sejak akhir tahun 2011 hingga 27 Januari 2012 membuahkan hasil. Kemenangan bagi buruh Kabupaten Bekasi juga memberikan dampak terhadap perekonomian serta kesejahteraan bagi buruh di seluruh Indonesia. Aksi tersebut juga menginspirasi bagi buruh-buruh di seluruh Indonesia untuk lebih berani dalam menyuarkan aspirasi mereka terhadap pemenuhan hak-hak dasar buruh untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

SUMMARY

This thesis entitled "Peranan FSPMI dalam Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi Tahun 1999-2012: Aksi Tutup Jalan Tol 27 Januari 2012" (The Role of FSPMI in Industrial Relations in Kabupaten Bekasi 1999-2012: Toll Road Occupation Action 27 January 2012) examines the movement of laborers in Bekasi Regency. About the problems discussed in this thesis are: what factors cause the toll road occupation action on January 27, 2012: how APINDO and Government reaction to the toll road closure action, how the results of the toll road closure action, especially for the workers in Bekasi Regency which is incorporated in Bekasi Working Labor. Because it is a historical research then the method used is a historical method that essentially consists of four steps in sequence, and there are: heuristics (source collection), source criticism, interpretation, and historiography. The approach used in this thesis is the history of labor movement, which includes various aspects, such as social, economic, political and so forth.

The results of this study can be explained as follows. First of all, the factors that caused the toll road occupation on 27 January 2012 which was the biggest labor action since the Reformation Era started, as well as the resistance efforts that done by the labors in Bekasi Regency against the attitude of Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Second of all is the reaction of DPK APINDO and the government either at the regency (kabupaten), provincial, or central level towards the dispute between labors in Bekasi Regency and DPK APINDO in Bekasi Regency. To dampen the heating up of industrial disputes, The Minister of Economy and The Minister of Manpower and Transmigration as central government representatives had a meeting to find a way out of the dispute. The government considers that the action has interrupted the economic and political stability, therefore the labor dispute that occurred in Bekasi Regency should be immediately resolved.

Ultimately, the result of the action is a victory for the labors. The struggle to claim basic rights since the end of 2011 to 27 January 2012 to fruition. Victory for labors in Bekasi Regency also gives an impact on the economy and welfare for the labors throughout Indonesia. The action also inspires labors throughout Indonesia to be more courageous in voicing their aspirations for the fulfillment of labor's basic rights to achieve a prosperous life.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal era Orde Baru, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari Demokrasi Terpimpin menjadi Demokrasi Pancasila. Akan tetapi partai-partai politik yang dianggap sebagai pilar Demokrasi Pancasila disederhanakan menjadi 3 partai yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dari yang sebelumnya sebanyak 10 partai politik. Sementara organisasi-organisasi gerakan buruh Indonesia atau serikat-serikat buruh pada tahun 1969 juga disatukan dalam suatu wadah dengan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI).

Pada tanggal 20 Februari 1973, Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) terbentuk tidak lama setelah terbentuknya MPBI. Federasi Buruh Seluruh Indonesia adalah organisasi yang keanggotaannya mencakup serikat buruh di seluruh sektor usaha, seperti: Serikat Buruh Tekstil Sandang dan Kulit (SBTSK) untuk sektor tekstil, Serikat Buruh Automotif Mesin dan Perbengkelan (SBAMP) untuk sektor otomotif, Serikat Buruh Elektronik (SB E), Serikat Buruh Percetakan dan Penerbitan (SB PERPEN), dan lain sebagainya.¹ Kehadiran FBSI tersebut diharapkan menjadi organisasi buruh yang kuat, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Namun demikian organisasi buruh internasional, khususnya *International Confederation of Free Trade Union* (ICFTU) dan *World Confederation of Labour* (WCL), beranggapan bahwa FBSI hanya merupakan organisasi buruh yang dibentuk dengan tujuan untuk kepentingan politik pemerintah atau rezim yang berkuasa.² Oleh karena itu, federasi tersebut cenderung dikendalikan oleh pemerintah sehingga bersifat tidak mandiri. Ketidakmandirian organisasi-organisasi atau serikat buruh pada era Orde Baru

¹Hidajat, M.S, *Seabad Gerakan Buruh Indonesia* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hlm 143.

²Hidajat, *Seabad Gerakan Buruh Indonesia*, hlm 134.

dengan mudah dapat diketahui dari peranan pemerintah yang mengatur pemimpin organisasi dan serikat buruh pada saat itu, yang dalam praktiknya harus mendapat ijin dan restu dari pemerintah daerah melalui Komando Distrik Militer (Kodim).³

Pada tanggal 26-30 November 1985, diselenggarakan Kongres Nasional II FBSI di Jakarta. Dalam kongres tersebut terjadi perubahan drastis dan fundamental dalam organisasi FBSI, yaitu struktur organisasi FBSI yang sebelumnya bersifat federatif diubah menjadi unitaris. Dengan perubahan itu maka FBSI tidak lagi bersifat mandiri, tetapi dipimpin menurut garis komando yang terpusat. Diperkirakan perubahan itu merupakan strategi rezim Orde Baru yang ingin memanfaatkan serikat-serikat buruh untuk mendukung kepentingan politiknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Tenaga Kerja Sudomo, bahwa diperlukan satu komando untuk menjalankan organisasi FBSI, sehingga apa yang telah dirumuskan oleh pimpinan organisasi dapat dijalankan oleh seluruh perangkat organisasi disetiap tingkatan.⁴ Sementara organisasi serikat buruh yang bersifat federatif memberikan kebebasan serikat-serikat baik di pusat maupun di daerah untuk memutuskan dan menjalankan kebijakan organisasi masing-masing. Selanjutnya agar struktur organisasi lebih efisien dan mudah maka dilakukan penyederhanaan jumlah anggota serikat-serikat buruh yang terorganisir dalam Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) 21 serikat menjadi 9 departemen. Di samping itu nama FBSI yang pada saat itu diketuai oleh Imam Sudarwo dirubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Selanjutnya pada tanggal 15-19 November 1995, kembali diselenggarakan Kongres Nasional IV SPSI di Caringin, Bogor yang membahas fungsi SPSI. Hasil dari kongres itu adalah sebagai berikut. Pertama bahwa fungsi SPSI adalah sebagai sarana atau wadah aspirasi buruh serta memberikan perlindungan bagi buruh. Kedua merubah sifat SPSI yang sejak diselenggarakannya Kongres

³Wawancara dengan Syawal Harahap, Wakil Sekjen FSPMI pada tanggal 24 Desember 2016.

⁴Gaol, L, Jimmy, *A to Z Human Capital: Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm 353-355.

Nasional II FBSI bersifat unitaris kembali menjadi federatif. Sebagai alasannya adalah sifat unitaris yang dipropaganda oleh pemerintah sejak tahun 1985 mengakibatkan aktivitas serikat-serikat pekerja anggota dan kebebasan menyatakan pendapat terbatas. Perubahan struktur organisasi SPSI pada Kongres Nasional tahun 1995 disebabkan oleh pergolakan buruh yang menanggapi bahwa SPSI terlalu dikendalikan oleh pemerintah serta tidak menjalankan fungsi dan peran serikat pekerja yang memperjuangkan hak-hak buruh.⁵ Ketiga, nama SPSI dirubah menjadi Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI).

Pada awal tahun 1998, yakni memasuki era Reformasi, tokoh-tokoh buruh menyambut kebebasan untuk berserikat dan berpendapat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28. Kebebasan berorganisasi buruh semakin menjadi kenyataan setelah Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 83 Tahun 1998 yang isinya merupakan sikap pemerintah RI yang meratifikasi atau yang berarti menyetujui *Convention Number 87 Concerning Freedom Of Association And Protection Of The Right To Organise* (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi).⁶ Isi terpenting dari konvensi itu adalah kebebasan warga negara untuk mendirikan dan bergabung dengan federasi ataupun konfederasi yang diinginkan serta menjalankan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan aturan lainnya, memilih pemimpin organisasi, mengatur dan melaksanakan berbagai program aktifitasnya. Dengan kebebasan berpendapat dan berserikat menjadikan organisasi buruh mempunyai status yang mandiri, yang artinya tidak terikat dari campur tangan pemerintah, apalagi tekanan atau intimidasi, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Mengenai munculnya organisasi-organisasi buruh di wilayah Kabupaten Bekasi dengan berbagai dinamikanya, adalah sejalan dengan berubahnya Bekasi sebagai wilayah pertanian dan penghasil beras menjadi kawasan industri yang

⁵Wawancara dengan Syawal Harahap, Wakil Sekjen FSPMI pada tanggal 24 Desember 2016.

⁶Hidajat, *Seabad Gerakan Buruh Indonesia*, hlm 180-181.

membutuhkan dan menyerap banyak sekali tenaga kerja (buruh).⁷ Perubahan itu terjadi sebagai konsekwensi logis dari terbitnya Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1976 mengenai daerah penyangga untuk DKI Jakarta, yaitu bahwa Bekasi bersama Bogor dan Tangerang (Botabek) dikembangkan menjadi wilayah penyangga ekonomi bagi ibukota negara, termasuk menyediakan perumahan bagi warga Jakarta.⁸ Langkah awal untuk mencapai tujuan itu adalah dibangunnya jalan tol Cawang-Cikampek pada tahun 1982.

Sebagai daerah penyangga ekonomi ibukota negara yaitu Jakarta, wilayah Bekasi selanjutnya dikembangkan menjadi kawasan industri melalui pendirian pabrik-pabrik. Hal itu dapat direalisasikan sehubungan dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1988 yang menetapkan bahwa Bekasi akan dikembangkan menjadi zona industri dan kawasan industri.⁹ Sampai pada tahun 2012 di wilayah Kabupaten Bekasi sudah berdiri dan beroperasi sebanyak 864 pabrik. Beberapa pabrik yang ada di kawasan industri Kabupaten Bekasi adalah PT. Sanyo Indonesia, PT. Mattel Indonesia, PT. Unilever Indonesia, dan lain sebagainya. Pabrik-pabrik bergerak di bidangnya masing-masing, seperti PT. Sanyo Indonesia merupakan salah satu pabrik yang bergerak di bidang elektronik, dengan memproduksi alat elektronik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu, salah satu pabrik yang bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, detergen, pasta gigi, dan lain sebagainya adalah PT. Unilever Indonesia. Selanjutnya, PT. Mattel Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi mainan, seperti mobil *Hot Wheels* dan boneka *Barbie*. Tentu saja pabrik-pabrik itu mempekerjakan sejumlah besar buruh baik yang berasal dari penduduk setempat maupun dari luar wilayah Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2012, jumlah karyawan atau buruh yang bekerja pada pabrik sebanyak 449.608 orang.

⁷Agnes Koen dkk, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota jilid 1* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001), hlm 206)

⁸Koen, *Profil Daerah Kabupaten*, hlm 206.

⁹Koen, *Profil Daerah Kabupaten*, hlm 206.

Beroperasinya banyak pabrik-pabrik yang mempekerjakan banyak sekali pekerja atau buruh itu selanjutnya diikuti dengan berdirinya sejumlah organisasi atau serikat buruh sesuai dengan bidang operasional atau produknya. Beberapa serikat buruh penting yang sudah berdiri sampai tahun 2000-an adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII).

Sehubungan dengan diratifikasinya konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 seperti telah dijelaskan di atas, pada tanggal 6 Februari 1999, Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (SP LEM) FSPSI menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Garut, dan sebagai hasilnya adalah lahirnya Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) FSPSI.¹⁰ Selanjutnya, pada tanggal 1 September 2001, Kongres Nasional II SPMI memutuskan bahwa SPMI keluar dari Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Reformasi dan membentuk Federasi sendiri.¹¹ Selanjutnya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melebarkan sayap pergerakannya dengan membuka cabang diberbagai daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Bekasi. Keluarnya SPMI dari FSPSI itu bisa diinterpretasikan sebagai tindakan mereposisi diri agar menjadi mandiri dan menjadi organisasi buruh yang demokratis.

Banyaknya buruh yang berorganisasi dalam serikat-serikat buruh dan senantiasa berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya di satu sisi, dan para majikan yang berprinsip memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara menekan biaya produksi termasuk upah buruh pada sisi yang lain, pada gilirannya sering mengakibatkan terjadinya konflik perburuhan. Dengan kata lain perselisihan atau konflik perburuhan itu merupakan ketidaksesuaian antara majikan dengan buruh yang biasa terjadi dalam hal hubungan kerja dan syarat-syarat perburuhan. Perselisihan industrial yang sering terjadi dalam praktik hubungan industrial adalah tuntutan kenaikan upah minimal untuk mengimbangi

¹⁰Materi Pendidikan Dasar FSPMI.

¹¹Materi Pendidikan Dasar FSPMI.

lonjakan harga kebutuhan pokok yang selalu meningkat pada setiap tahunnya. Oleh para buruh, perselisihan perburuan ini biasanya diekspresikan dalam bentuk demo dan mogok massal.

Akan tetapi di Kabupaten Bekasi, aksi buruh yang terjadi pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 27 Januari, tidak hanya mogok kerja massal, tetapi juga aksi tutup jalan tol yang melumpuhkan lalu lintas antara Jakarta – Cikampek Km 32. Oleh karenanya peristiwa itu sangat menarik untuk dikaji dalam skripsi yang berjudul: *Peranan FSPMI dalam Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi Tahun 1999-2012: Aksi Tutup Jalan Tol 27 Januari 2012*. Aksi itu terjadi sebagai akibat konflik perburuan khususnya yang menyangkut Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi antara para buruh yang tergabung dalam Buruh Bekasi Bergerak (BBB) melawan para pengusaha yang diwakili oleh DPK APINDO (Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia). Aksi yang berlangsung sejak pukul 8.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB mengakibatkan lumpuhnya lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek sepanjang 21 Km.

Oleh karena terjadi di luar kawasan industri dan mengakibatkan gangguan kepentingan umum, yaitu macetnya jalan tol Jakarta–Cikampek, maka aksi itu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Hal itu dapat diketahui dari hadirnya Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tengah-tengah aksi para buruh untuk ikut mencarikan jalan keluar dan menyelesaikan permasalahan. Barang kali aksi itu memang disengaja meluas menjadi isu nasional dan agar memperoleh perhatian dari pemerintah pusat. Hal ini bisa dimengerti karena merupakan puncak konflik antara buruh Kabupaten Bekasi dengan DPK APINDO Kabupaten Bekasi, yang sudah lama terjadi tidak kunjung menemukan jalan keluarnya.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang dan rumusan masalah terjadinya aksi tutup jalan tol tersebut, maka pertanyaan penelitian yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya aksi tutup tol pada tanggal 27 Januari 2012 ?

2. Bagaimana reaksi APINDO dan Pemerintah terhadap aksi tutup tol ?
3. Bagaimana hasil dari aksi tutup tol, khususnya bagi para buruh di Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Buruh Bekasi Bergerak ?

B. Ruang Lingkup

Dalam penelitian sejarah perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup agar proses penelitian dapat lebih terfokus dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan metodologis.¹² Sementara penelitian sejarah mengenal tiga ruang lingkup, yakni temporal, spasial, dan keilmuan.

Ruang lingkup temporal skripsi ini adalah dari tahun 1999 sampai tahun 2012. Tahun 1999 dipilih menjadi batas awal dengan alasan bahwa tahun itu merupakan terbentuknya cikal bakal FSPMI. Sementara itu, tahun 2012 dipilih sebagai batas akhir dengan alasan terjadi aksi mogok kerja dan tutup tol di Kabupaten Bekasi.

Ruang lingkup spasial dalam skripsi ini adalah Kabupaten Bekasi. yang merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia, serta menjadi penyangga ekonomi bagi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kabupaten Bekasi berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan Kabupaten Bogor di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Karawang di sebelah timur, dan di sebelah barat berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kota Bekasi.¹³

Selanjutnya, ruang lingkup keilmuan dalam skripsi ini adalah sejarah pergerakan buruh, yang meliputi semua aksi perjuangan kaum buruh untuk memperbaiki kondisi kerja dan kesejahteraan ekonomi mereka. Hanya saja dalam skripsi ini dibatasi pada Aksi Tutup Jalan Tol tahun 2012 di Kabupaten Bekasi

¹²Taufik Abdullah, editor, *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 10.

¹³Koen, *Profil Daerah Kabupaten*, hlm 204.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan serta pembatasan ruang lingkup di atas, maka dapat dikembangkan beberapa pokok penelitian yang menjadi fokus utama penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi strata-1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
2. Mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mogok kerja dan aksi tutup tol yang terjadi di Kabupaten Bekasi pada tanggal 27 Januari 2012.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam mengembangkan wawasan dan sebagai bahan acuan untuk membangun kerangka berpikir, maka berikut ini disajikan tinjauan terhadap beberapa pustaka acuan yang relevan dengan topik penulisan skripsi ini.

Pertama adalah buku “SEABAD GERAKAN BURUH INDONESIA” karya M.S Hidajat. Buku ini menguraikan perjuangan buruh sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, pendudukan Jepang, zaman Orde Lama, Orde Baru bahkan hingga zaman Reformasi. Pada masa kolonial Belanda, pergerakan buruh baru dimulai ketika perebutan pimpinan *Vereeniging van Spoor en Tramweg Personeel in Nederlandsch Indie* (VSTP) dari orang-orang Belanda oleh anggota yang berasal dari Bumiputra pada tahun 1912. Selanjutnya, terjadi pergantian Ketua VSTP dari H.F.J.M. Sneevliet ke Semaun. Dengan berhasilnya Bumiputra memimpin VSTP, banyak bermunculan serikat-serikat buruh yang anggota dan pengurusnya berasal dari Bumiputra. Beberapa dari serikat-serikat tersebut adalah Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) pada tahun 1912, Persatuan Guru Kasultanan dan Pakualaman (PGKP) pada tahun 1913, Perserikatan Pegawai Pegadaian Boemipoetera (PPPB) pada tahun 1914, *Opium Regie Bond* (ORB) pada tahun 1915, Perhimpunan Kaum Buruh dan Tani pada tahun 1918, dan lain sebagainya. Pada tahun 1920, diperkirakan terdapat 100 serikat buruh yang tersebar diberbagai perusahaan dan pemerintahan.

Pergerakan buruh pada masa kolonial Belanda tergolong bersifat radikal. Hal tersebut dikarenakan buruh memiliki tujuan yang sama, yakni melepaskan diri dari penjajahan atas pemerintah kolonial Belanda. Salah satu bentuk pergerakan buruh yang terjadi pada masa kolonial Belanda adalah dengan diselenggarakan aksi mogok kerja oleh buruh Pabrik Gula Djengkol, Ploso, Klaten, Jawa Tengah pada tahun 1920. Faktor utama yang menyebabkan buruh menyelenggarakan mogok kerja massal adalah pemecatan atas 4 rekannya dengan alasan yang tidak jelas. Dari 4 orang tersebut, salah satunya adalah seorang kuli borongan yang dipecat dengan alasan malas kerja, namun sebelum dipecat, buruh tersebut mendapat siksaan secara fisik. Aksi mogok kerja tidak hanya terjadi pada tahun 1920 saja, pada tanggal 23 April 1923, VSTP mengadakan mogok kerja besar-besaran. Aksi mogok kerja tersebut dimulai dari kota Semarang, menuju ke Madiun, Surabaya, Cirebon, dan di stasiun-stasiun kereta api kota kecil lainnya dengan jumlah peserta aksi kurang lebih 13.000 buruh kereta api. Pada tanggal 8 Mei 1923, Semaun ditangkap karena dianggap sebagai otak dari pemogokan yang terjadi pada tanggal 23 April 1923.

Pada periode tahun 1927 sampai 1945, pergerakan buruh tidak banyak melakukan aksi. Periode ini dianggap sebagai “masa tenang”, hampir tidak terjadi aksi mogok kerja, kecuali aksi demonstrasi, mengajukan mosi atau menyebarkan petisi ke *Volksraad* dan Parlemen Belanda. Sementara itu, para tokoh-tokoh besar dalam memperjuangkan kemerdekaan seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo, Dr. A. Rivai, Teuku Tjhik Mohammad Thayeb, R.A.A. Jayadiningrat, Abdul Muis, Muh. Husni Thamrin, dan H. Agus Salim tetap gencar dalam melakukan perlawanan melalui *Volksraad*. Perlawanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut bertujuan untuk membela nasib kaum buruh, terutama dari jeratan *Koelie Ordonantie*, yang pada akhirnya membuahkan hasil dengan dicabutnya *Ordonantie* pada tanggal 1 Januari 1942. Pada masa pendudukan Jepang, seluruh organisasi politik, serikat buruh ataupun organisasi lainnya dibubarkan oleh Jepang. Pada masa itu, Jepang banyak mendirikan

organisasi-organisasi dengan tujuan membantu pemerintah Jepang untuk kepentingan propaganda Perang Asia Timur Raya.

Pada masa Orde Lama, yakni lebih tepatnya pada tanggal 20 April 1948 di Yogyakarta, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948. Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 adalah undang-undang pertama yang mengatur pekerjaan pada umumnya pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia mengenal dua peraturan di bidang perburuhan, pertama berdasarkan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948, dan yang kedua berdasarkan peraturan pada umumnya kelanjutan hukum kolonial yang berlaku untuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka pada tanggal 6 Januari 1951, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.

Perjuangan buruh dalam menuntut hak-haknya tidak berhenti setelah kemerdekaan Indonesia. Pada masa Orde Lama, buruh masih melakukan aksi mogok kerja ketika kesepakatan dengan pihak majikan atau pabrik tidak terselesaikan. Untuk meredam aksi mogok kerja, maka dikeluarkan Peraturan Militer Nomor 1 Tahun 1951 tentang Larang Mogok Kerja dan *Lock Out*. Namun dalam praktiknya, peraturan ini hanya sanggup mengatasi sebagian saja dari perselisihan yang terjadi di bidang perburuhan. Untuk mengatasi perselisihan buruh yang terjadi, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan industrial sebagai pengganti Peraturan Militer. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tidak lantas membuat buruh senang, buruh menganggap undang-undang itu tidak memihak buruh dan tidak demokratis. Dengan berbagai pertimbangan, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial dan mencabut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951.

Selama periode Orde Lama, pemerintah menerbitkan 3 undang-undang tentang perburuhan yang menjadi momentum pergerakan buruh. Ketiga undang-undang tersebut adalah, pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948. Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang diratifikasinya Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Darpada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama. Isi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 adalah negara menjamin kebebasan bagi buruh untuk berorganisasi dalam memperjuangkan hak-hak buruh, dan negara juga melindungi serikat buruh dari intimidasi atau campur tangan majikan dalam menjalankan atau mengurus organisasi buruh. Ketiga, Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang diratifikasinya Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 100 mengenai Pengupahan yang sama bagi buruh pria dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama. Dengan meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 100, maka pemerintah harus menjamin pengupahan yang sama bagi buruh pria dan buruh wanita dalam suatu pekerjaan yang sama nilainya.

Selanjutnya, pergerakan buruh pada masa Orde Baru berada pada titik terendah. Sistem penyederhanaan partai memberikan dampak yang signifikan atas pergerakan buruh. Pergerakan buruh pada masa Orde Baru berada di bawah kendali penuh pemerintah, dengan menggabungkan seluruh serikat buruh dalam satu organisasi yang bersifat unitaris, mengakibatkan organisasi tersebut tidak mandiri dan demokratis. Pada tahun 1969, setelah melakukan penyederhanaan terhadap partai-partai politik, pemerintah membentuk Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) sebagai satu-satunya wadah perjuangan kaum buruh. Namun dalam praktiknya, buruh tidak lagi mampu melakukan perlawanan dikarenakan fungsi dan peranan MPBI, mendapat campur tangan pemerintah. Pada tanggal 20 Februari 1973, Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) terbentuk untuk menggantikan MPBI. Selanjutnya, pada tanggal 26-30 November 1985, FBSI mengadakan Kongres Nasional II, dan menghasilkan perubahan bentuk organisasi dan strukturnya. Perubahan terpenting yang terjadi pada kongres

tersebut adalah bentuk FBSI dari federatif menjadi unitaris, serta merubah nama organisasi menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Namun dalam praktiknya, tidak banyak yang berubah dalam hal kesejahteraan buruh, buruh berada pada posisi tawar yang rendah, peran pemerintah dalam mencampuri organisasi SPSI semakin nyata. Hingga pada akhirnya, SPSI kembali merubah bentuk organisasinya menjadi federatif pada Kongres Nasional IV yang diselenggarakan tanggal 15-19 November 1995. Diubahnya kembali dari unitaris ke federatif membuat SPSI merubah namanya menjadi Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI). Secara garis besar, perjuangan buruh pada masa Orde Baru tidak begitu nampak, hal ini dikarenakan pemerintah ikut andil dalam pemilihan ketua cabang serikat pekerja melalui Komando Distrik Militer (Kodim).

Perjuangan buruh mencapai puncaknya pada masa Reformasi. Dengan diratifikasinya Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998, pemerintah seperti membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi buruh untuk berserikat dan berorganisasi. Pada tahun 2000, tepatnya tanggal 4 Agustus, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menguraikan persyaratan dalam membentuk suatu serikat pekerja/serikat buruh. Dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998, buruh-buruh memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk membentuk organisasi atau serikat-serikat maupun federasi serikat.

Pada tahun 2003, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang kedua undang-undang sebelumnya berisi tentang ketenagakerjaan. Diterbitkannya UU No. 13 Tahun 2003, tidak lantas dapat diterima seutuhnya oleh kalangan buruh, terjadi perdebatan panjang antara pihak buruh dengan pengusaha tentang status buruh *outsourcing*, mogok kerja, pengupahan, dan rumusan pesangon pada saat buruh

dipecat. Selanjutnya, pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai pedoman baik bagi buruh maupun perusahaan dalam menyelesaikan perselisihan. Diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2004, diharapkan pemerintah agar buruh dan perusahaan dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dalam lingkup bipartit saja, jika tidak dapat diselesaikan secara bipartit maka pemerintah telah menentukan alur penyelesaian perselisihan itu melalui UU No. 2 Tahun 2004.

Dalam buku ini juga menguraikan secara garis besar tentang aksi mogok kerja dan tutup tol yang dilakukan oleh buruh di Kabupaten Bekasi pada tanggal 27 Januari 2012. Buku ini memberikan kritikan kepada buruh maupun APINDO yang tidak memaksimalkan peran institusi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai media mediasi atas perselisihan industrial pada kasus mogok kerja dan tutup yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2012 di Kabupaten Bekasi. Buku ini berpendapat bahwa aksi pada tanggal 27 Januari 2012 di Kabupaten Bekasi tidak akan terjadi jika pihak buruh dan APINDO memanfaatkan dengan baik PHI dan menaati UU No. 2 Tahun 2004.

Pada buku tersebut juga menjelaskan kasus *outsourcing* yang terkait dengan Pasal 59, 64, 65 dan 66. Berdasarkan pasal-pasal itu, para pekerja dalam kelompok ini sewaktu-waktu dapat kehilangan memperoleh penghasilan secara teratur dan bersinambungan sesuai dengan masa kerjanya. Karenanya pihak pekerja/buruh sering turun ke jalan, berunjuk rasa menentang pasal-pasal tersebut di atas, bagi pekerja/buruh, *outsourcing* itu tidak lebih sebagai bentuk “pemerasan gaya baru” terhadap pekerja/buruh pada era globalisasi, tidak adil dan tidak manusiawi.

Relevansi dari buku diatas adalah buku tersebut menguraikan perjalanan pergerakan buruh di Indonesia secara detail dan rinci. Buku ini menyajikan kiprah perjalanan panjang Gerakan Buruh Indonesia, diawali tahun 1912 sampai dengan awal tahun 2000-an yang lebih tepatnya awal tahun 2012. Dalam buku ini menjadi salah satu pedoman bagi peneliti untuk mengetahui perjuangan buruh pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Hal tersebut dikarenakan isi dari buku Seabad

Gerakan Buruh Indonesia lebih banyak menguraikan perjuangan buruh pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Buku ini hanya sedikit menguraikan perjuangan buruh pada masa Reformasi dan lebih banyak menguraikan tentang serikat-serikat buruh yang dibentuk pada masa Reformasi. Pada akhir bagian buku, M.S. Hidajat selaku penulis buku, menguraikan secara garis besar tentang aksi yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2012 di Kabupaten Bekasi serta memberikan kritikan kepada pihak buruh, pengusaha, dan pemerintah. Namun, buku ini hanya memberikan gambaran umum permasalahan buruh pada setiap jamannya.

Buku kedua adalah “Bekasi dari Masa ke Masa”, buku yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan editor M. Harun Alrasyid dkk ini membantu peneliti dalam mengenal Kabupaten Bekasi secara detail, baik dari segi wilayah, perekonomian, mata pencaharian bahkan buku tersebut menceritakan sedikit sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi. Buku ini juga menjelaskan mengapa Kabupaten Bekasi yang pada zaman pemerintahan Orde Baru menjadi lumbung padi provinsi beralih fungsi menjadi kawasan industri, serta kebijakan yang diambil oleh setiap bupati dalam menanggulangi permasalahan di Kabupaten Bekasi khususnya tentang kawasan industri.

Pada tahun 2000, seiring dengan membaiknya indikator ekonomi nasional pasca krisis moneter pada tahun 1998, iklim investasi di wilayah Kabupaten Bekasi mulai berjalan dengan baik. Ini bisa dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dari 21,36 pada tahun 1998 mengalami perubahan ke arah yang positif, yaitu sebesar 2,4% pada akhir tahun 1999.¹⁴ Kabupaten Bekasi ternyata masih menjadi tujuan bagi kalangan urban, meskipun dalam kondisi krisis moneter. Pada tahun 1997 jumlah penduduk Kabupaten Bekasi sebanyak 1.225.523 jiwa, dan pada bulan Mei 1999 telah terjadi peningkatan menjadi 1.324.504 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 8,077% per tahun.¹⁵

¹⁴M. Harun Alrasyid, *Bekasi dari Masa ke Masa* (Kabupaten Bekasi: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi, 2006), hlm 122.

¹⁵Harun, *Bekasi dari Masa ke Masa*, hlm 123.

Sedangkan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bekasi memindahkan kantor pemerintahan ke wilayah Kota Cikarang. Pemindahan ibukota baru tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1998 tanggal 28 Desember 1998, dan ditandatangani oleh Presiden BJ Habibie.¹⁶ Salah satu alasan mengapa Kota Cikarang dipilih menjadi ibukota Kabupaten Bekasi adalah pembangunan di Kabupaten Bekasi mengalami perkembangan yang pesat, khususnya di wilayah timur yang telah berkembang menjadi kota industri, perdagangan dan perumahan.

Relevansi dari buku diatas adalah buku tersebut menggambarkan tentang Kabupaten Bekasi dari masa ke masa. Buku tersebut juga meringkas tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Bekasi, serta sikap pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pembangunan infrastruktur dan suprastruktur untuk menunjang Kabupaten Bekasi menjadi daerah kawasan industri. Buku yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi ini terlihat sebagai bentuk pencitraan pemerintah dalam membangun daerahnya, buku tersebut melupakan permasalahan di Kabupaten Bekasi seperti meningkatnya pengangguran, sentralisasi pembangunan, dan tingkat kemiskinan di beberapa daerah yang tertinggal.

Buku ketiga yang menjadi tinjauan pustaka peneliti adalah “KAPITAL. Buku II: Proses Sirkulasi KAPITAL”, buku yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh HASTA MITRA dan di editor oleh Edi Cahyono ini menjelaskan tentang peranan kaum kapitalis dalam menguasai perekonomian suatu daerah atau negara. Buku ini juga menjadi dasar atas semua pergerakan kaum proletar dalam menuntut hak-haknya. Kapital, sebagai nilai swa-valorisasi, tidak hanya terdiri atas hubungan-hubungan kelas, suatu sifat sosial tertentu yang bergantung pada keberadaan kerja sebagai kerja-upahan (buruh). Ia merupakan suatu gerakan, suatu proses sirkular melalui berbagai tahapan, yang sendiri pada giliran mencakup tiga bentuk berbeda-beda dari proses sirkulasi itu.¹⁷

¹⁶Harun, *Bekasi dari Masa ke Masa*, hlm 124.

¹⁷Oey Hay Djoen, dkk, *KAPITAL*. (Jakarta: Hasta Mitra – Ultimus & Institute for Global Justice, 2006), hlm 112.

Sesungguhnya, produksi kapitalis adalah produksi komoditi sebagai bentuk umum produksi, tetapi ia hanya seperti itu, dan menjadi semakin seperti itu di dalam perkembangannya, karena kerja itu sendiri di sini tampil sebagai suatu komoditi, dan lagi pula, seperti yang kita asumsikan, pada suatu nilai yang ditentukan oleh biaya-biaya reproduksinya.¹⁸ Dalam hubungan antara kapitalis dan buruh, hubungan uang, hubungan pembeli dan penjual, menjadi suatu hubungan yang melekat dalam produksi itu sendiri, tetapi hubungan ini pada dasarnya terletak pada sifat sosial dari produksi, tidak pada cara perdagangan.¹⁹

Dalam periode bekerja, terdapat perbedaan yang sangat penting di dalam durasi tindak produksi, yaitu dalam durasi proses-proses kerja yang diulang dan diharuskan untuk menghasilkan produk itu dalam bentuk jadinya, mengirimkannya ke pasar sebagai sebuah komoditi.²⁰ Perbedaan-perbedaan durasi tindak produksi ini tidak hanya terjadi di antara berbagai cabang produksi, melainkan juga di dalam cabang (industri) yang sama, sesuai ukuran produk yang harus ditawarkan. Perbedaan dalam panjangnya tindak produksi dengan demikian bervariasi secara tidak terhingga.²¹

Alasan memilih buku diatas sebagai tinjauan pustaka adalah semakin berkembangnya kaum kapitalis di Indonesia khususnya kawasan industri di Kabupaten Bekasi yang menekan hak-hak dan kesejahteraan buruh atau kaum proletar. Buku tersebut juga menjabarkan bagaimana cara kaum kapitalis meraup keuntungan yang melimpah dengan mempekerjakan buruh dengan upah yang minim, hal ini tidak sesuai dengan konsep tripartit yang seharusnya berjalan untuk kepentingan bersama.

Pada buku keempat, peneliti memilih buku “Hubungan Industrial Di Indonesia” karya Sri Haryani menjadi tinjauan pustaka peneliti. Buku yang terbit pada tahun 2002 oleh Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, buku ini

¹⁸Djoen, *KAPITAL*, hlm 134.

¹⁹Djoen, *KAPITAL*, hlm 135.

²⁰Djoen, *KAPITAL*, hlm 254.

²¹Djoen, *KAPITAL*, hlm 255.

menjelaskan bagaimana hubungan antara buruh dengan pemilik perusahaan secara rinci, mulai dari penawaran tenaga kerja, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, hingga perselisihan hubungan industrial dan penyelesaiannya.

Dalam hubungan industrial dibedakan menjadi dua, yaitu: *man power marketing* dan *man power management*. *Man power marketing* adalah pemasaran tenaga kerja secara umum membahas penentuan syarat-syarat kerja yang akan diterapkan dalam pelaksanaan ikatan kerja yang ada.²² Dalam penentuan syarat-syarat kerja secara individu, berarti hanya individu tersebut yang terikat dengan ketentuan syarat-syarat kerja, maka dalam penetapannya juga hanya melibatkan karyawan yang bersangkutan dengan pihak perusahaan/pengusaha, yang selanjutnya disebut *individual bargaining*. Selain penentuan syarat-syarat kerja individu, penentuan syarat-syarat kerja juga dapat dikenakan secara kelompok, yang disebut dengan *collective bargaining*. Syarat-syarat kerja yang ditentukan, meliputi:

- 1) Jam kerja
- 2) Hari kerja
- 3) Tempat kerja
- 4) Upah, dan
- 5) Jaminan sosial

Man power management adalah hal yang membahas pelaksanaan syarat-syarat kerja dan berbagai permasalahan serta pemecahannya, proses ini terjadi setelah karyawan bergabung dengan perusahaan. Dalam praktek pelaksanaan syarat-syarat kerja ini berlaku umum, namun dalam pelaksanaan syarat kerja beserta permasalahan dan pemecahannya diterapkan secara individu.²³ Selain pelaksanaan syarat-syarat kerja, penanganan permasalahan dan pemecahannya secara individu. Sebagai konsekuensinya, para pekerja tersebut harus menerima pelaksanaan syarat-syarat kerja, dan pemecahan permasalahannya kepada serikat

²²Sri Haryani, *Hubungan Industrial Di Indonesia* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2002), hlm 4.

²³Sri Haryani, *Hubungan Industrial Di Indonesia*, hlm 5.

pekerja. Secara terperinci pelaksanaan syarat-syarat kerja, permasalahan yang dihadapi dan pemecahannya yang diwakilkan kepada serikat pekerja meliputi:

- 1) Penarikan tenaga kerja
- 2) Pengembangan tenaga kerja
- 3) Kompensasi
- 4) Integrasi
- 5) Pemeliharaan

Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, asosiasi pengusaha pertama kali lahir pada 31 Januari 1952, dengan nama Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Indonesia (PUSPI). Pada Musyawarah Nasional (Munas) pertama pada tanggal 16 Januari 1982 di Yogyakarta, terjadi pergantian nama menjadi Perhimpunan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Indonesia (PUSPI). Dalam Munas kedua pada tanggal 16 Januari 1985 di Surabaya, terjadi lagi pergantian nama menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).²⁴

Relevansi dari buku tersebut adalah buku tersebut menggambarkan secara teori bagaimana memecahkan permasalahan dalam dunia industri, fungsi serikat pekerja, fungsi dari APINDO dan lain sebagainya. Namun, buku tersebut tidak mencantumkan bentuk nyata permasalahan dan bagaimana cara memecahkan permasalahan yang pernah terjadi di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep atau definisi permasalahan yang akan dibahas. Sebagai fungsinya adalah untuk memahami peristiwa yang terjadi secara sistematis, dengan cara menghubungkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh secara harmonis.

Dalam skripsi ini karya Charles Tilly dapat dijadikan kerangka acuan untuk menjelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya pemogokan, yang dianggap

²⁴Sri Haryani, *Hubungan Industrial Di Indonesia*, hlm 20

sebagai suatu tindakan kolektif.²⁵ Terdapat tiga penting yang berkaitan erat dengan terjadinya pemogokan yaitu *interests*, *mobilization* dan *opportunity*. Yang pertama yaitu *interests*, adalah kepentingan berbagai pihak atau kelompok dalam suatu aksi pemogokan, yaitu para buruh sendiri, serikat dan partai politik. Akan tetapi yang pasti harus ada permasalahan atau keluhan-keluhan yang dirasakan oleh buruh. Hal itu bisa berkaitan dengan upah yang rendah atau persyaratan kerja yang buruk. Sementara serikat atau partai politik bisa mengemas keluhan-keluhan itu dalam bentuk tuntutan yang disertai dengan ancaman aksi pemogokan. Yang kedua yaitu *mobilization*, adalah usaha untuk menggerakkan dan sekaligus mengendalikan potensi yang ada dari suatu kelompok dalam menghadapi lawan yang sama dan untuk mencapai kepentingan bersama. Mobilisasi ini bisa dilakukan oleh salah satu atau beberapa tokoh dari kelompok itu, atau bisa dari pihak luar baik perorangan maupun kelompok organisasi tertentu (serikat atau partai politik). Sementara *opportunity* adalah kesempatan yang muncul dan biasanya menimbulkan *casus belli* meletusnya pemogokan. *Opportunity* itu juga berkaitan dengan kelompok masyarakat yang ada di sekitarnya yang cenderung mendukung atau tidak menghalangi jika terjadi gerakan atau aksi pemogokan. Mengenai bentuk aksi itu bisa *strike*, yaitu berhenti bekerja dengan cara tidak datang atau masuk kerja, *sit down strike* yaitu datang ke tempat kerja tetapi tidak melakukan pekerjaan apapun atau duduk-duduk, *slow down action* yaitu bekerja secara lambat atau dengan sengaja memperlambat pekerjaan, dan yang terakhir *perfect action*, bekerja berlama-lama dengan dalih agar hasil pekerjaan menjadi sempurna.

Selanjutnya perlu dijelaskan pula mengenai pengertian atau konsep konflik atau perselisihan industrial. Menurut UU No. 22 Tahun 1957, perselisihan industrial ialah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan keadaan

²⁵Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*. California: Addison-Wesley Publishing Company, 1978.

perburuhan.²⁶ Berdasarkan pengertian di atas, maka perselisihan industrial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena salah satu pihak dalam perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian, peraturan majikan atau perundang-undangan.
2. Perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh karena tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.

F. Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber

Metode sejarah adalah alat untuk menguji dan menganalisa secara kritis sumber-sumber sejarah, yang selanjutnya menyajikannya menjadi kisah sejarah. Pada dasarnya terdapat empat langkah utama secara berurutan dalam metode sejarah yaitu:²⁷

1. Heuristik, yaitu kegiatan dalam mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Berdasarkan asal-usulnya, sumber sejarah dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang keterangan atau informasinya diperoleh secara langsung oleh orang atau alat mekanis perekam yang menyaksikan jalannya peristiwa. Sementara sumber sekunder adalah sumber yang keterangan atau informasinya diperoleh oleh sejarawan dari orang atau alat perekam yang tidak secara langsung hadir atau menyaksikan jalannya peristiwa. Mengenai sumber-sumber sejarah baik primer maupun sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini antara lain: AD/ART FSPMI, SK Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1540-Bangsos/2011, foto-foto aksi, SK Gubernur Jawa Barat

²⁶Mokh. Najih, *Munir dan Gerakan Perlawanan Buruh* (Malang: In-TRANS Press, 2005), hlm 33.

²⁷Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22-23.

No. 561/Kep.211-Bangsos/2012, surat kabar baik cetak maupun online yang relevan dengan penelitian/kajian skripsi ini antara lain surat kabar harian Kompas terbitan tanggal 12-28 Januari 2012 dan Suara Merdeka terbitan tanggal 28 Januari 2012. Sementara itu, surat kabar online yang digunakan antara lain: Antara *News*, Tribun *News*, Viva, Republika, dan Pikiran Rakyat. Adapun sumber primer yang lain adalah sumber lisan yang berasal dari wawancara langsung dengan tokoh-tokoh FSPMI baik yang terlibat dalam pembentukan FSPMI maupun yang terlibat dalam aksi 27 Januari 2012, seperti Sukamto, Endang G. S, M. Nurfahrozi, Obon Tabroni, dan Syawal Harahap.

2. Kritik sumber, Kritik adalah kegiatan menilai dan menguji sumber-sumber sejarah yang diperlukan baik bentuk (fisik) maupun isinya. Setiap sumber memiliki aspek ekstern dan intern. Aspek ekstern berkaitan dengan persoalan apakah sumber yang ditemukan itu memang merupakan sumber sejati yang diperlukan. Sementara aspek intern berkaitan dengan persoalan apakah sumber itu berisi informasi yang diperlukan. Sehubungan dengan itu terdapat dua jenis kritik yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menilai dan menguji apakah sumber itu secara fisik memang sumber asli yang dibutuhkan. Sementara kritik intern bertujuan untuk memperoleh informasi yang kredibel atau bisa dipercaya, yang dalam ilmu sejarah disebut dengan istilah fakta sejarah (*historical fact*).
3. Interpretasi, adalah kegiatan memaknai fakta-fakta sejarah yang sudah diperoleh, dengan merangkaikan dan menghubungkan fakta-fakta sejarah tersebut secara harmonis, yaitu hubungan kronologis dan hubungan sebab akibat (kausal).
4. Historiografi, adalah langkah atau tahapan terakhir dalam penelitian sejarah, yaitu kegiatan menyajikan hasil penelitian sejarah menjadi kisah sejarah dalam berbagai bentuknya, dalam pada kesempatan ini adalah skripsi.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi sejarah yang berjudul “*Peranan FSPMI dalam Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi Tahun 1999-2012: Aksi Tutup Jalan Tol 27 Januari 2012*” ini penelitiannya disusun dalam lima bab. Setiap bagian menitik beratkan pada permasalahan tertentu dan diantara bab memiliki keterkaitan hubungan, karena itu peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, ruang lingkup, tujuan pembahasan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan penggunaan sumber serta sistematika penelitian.

Bab II, berjudul Gambaran Umum Kabupaten Bekasi Masa Orde Baru Hingga Reformasi. Pada bab ini akan dibahas sejarah Kabupaten Bekasi, kondisi wilayah Kabupaten Bekasi dan kondisi penduduk Kabupaten Bekasi yang meliputi kondisi wilayah, kondisi penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan ekonomi, kondisi penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan pendidikan, dan kondisi penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan keagamaan, hingga pada awal era reformasi. Pada awal era reformasi, kondisi sosial ekonomi dan sosial politik sangat penting untuk dibahas, hal ini nantinya juga menyangkut kepada Perda No. 13/1988 yang berdampak kepada meningkatnya jumlah buruh di Kabupaten Bekasi.

Bab III, pada bab ini peneliti memberi judul FSPMI Sebagai Organisasi Buruh Mandiri. Pada bab ini, peneliti akan memfokuskan penelitian pada awal terbentuknya FSPMI, pilar-pilar organisasi, konsolidasi FSPMI baik dengan buruh ataupun dengan organisasi buruh lainnya, hubungannya dengan Omah Tani Batang dan terjunnya anggota FSPMI dalam kancah dunia politik. Di bab ini juga akan dikupas tuntas tentang ideologi FSPMI serta tujuan atas segala kegiatannya.

Bab IV, berjudul Aksi Buruh Tutup Jalan Tol Jum’at 27 Januari 2012. Pada bab ini, peneliti akan mengungkap sebuah kejadian yang memberikan dampak yang luar biasa bagi tiga belah pihak, yakni; negara, APINDO dan buruh serta mengungkap faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan aksi itu terjadi. Sebuah aksi yang didasari oleh pengkhianatan APINDO terhadap kesepakatan

dengan buruh perihal pencabutan gugatan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.1540-Bangsos/2011 di PTUN Bandung tentang upah minimum buruh di Kabupaten Bekasi tahun 2012. Pada bab ini, peneliti akan menggunakan teori-teori para ahli untuk menganalisis peran dari tokoh-tokoh buruh, kondisi sosial yang menyebabkan gejolak sosial, faktor pencetus, penyebaran keyakinan hingga pada akhirnya buruh dapat menduduki tol Jakarta-Cikampek selama 9 jam, serta peranan pemerintah dalam menangani kejadian tersebut.

Bab V merupakan penutup atau kesimpulan dari pembahasan ini. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan dan pembahasan berupa latar belakang FSPMI terbentuk dan pelaksanaan kegiatan serta aksi-aksi yang dilakukan oleh FSPMI di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi. Di bab ini juga disajikan pendapat peneliti tentang semua hal yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.